

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Konsep Ekonomi Politik

Ekonomi politik merupakan salah satu kajian ilmu politik yang berasal dari dua bidang yang berbeda yaitu ekonomi dan politik. Pemikiran-pemikiran kaitan antara ilmu ekonomi dengan politik sudah ada sejak jaman Yunani kuno, namun ilmu ekonomi politik baru terbentuk oleh ekonom klasik Adam Smith pada tahun 1776 dengan tulisannya yang berjudul *The Wealth of Nation*. Pada masa klasik, ilmu ekonomi dan ilmu politik masih menyatu. Kemudian sejak munculnya pakar-pakar neoklasik ada jarak antara ilmu ekonomi dengan ilmu politik yang disebabkan oleh berkembangnya ilmu ekonomi lewat ilmu matematika. Namun pada akhirnya pakar-pakar neoklasik ini menyadari bahwa perlunya ekonomi dan politik beriringan sebagai sistem negara.¹

Ekonomi politik awalnya hadir sebagai ilmu yang berusaha memberikan nasihat-nasihat kepada negarawan dalam menjalankan tugasnya, yakni demi mengelola perekonomian negara agar kebutuhan warga negaranya terpenuhi. Seiring berjalannya waktu, kesadaran untuk memenuhi kebutuhan salah satunya adalah dengan cara mendapatkan bantuan dari orang lain. Karena tidak setiap kebutuhan dapat dipenuhi oleh sendiri, maka diperlukan kerja sama dengan pihak lain. Jika dilihat dari konteks negara, apabila negara memerlukan

¹ Deliarnov, *Ekonomi Politik* (Jakarta: Erlangga, 2006)

sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya, maka diperlukan interaksi dengan pihak lain atau negara lain. Untuk itu biasanya bersinggungan dengan pengabilan keputusan ekonomi politik.²

Beberapa permasalahan yang tidak dapat dituntaskan oleh produsen dan konsumen atau mekanisme pasar juga menunjukkan bahwa perlunya penanganan pemerintah terhadap peristiwa-peristiwa ekonomi. Maka para ekonom bekerjasama dengan pakar politik dalam penyelesaian masalah ekonomi tersebut. Memang dalam mengartikan Ekonomi Politik sendiri cukup sulit mengingat banyak sekali pandangan yang berbeda-beda dalam mengartikan ekonomi maupun politik itu sendiri. Namun Martin Staniland yang telah mengecek ratusan katalog di perpustakaan menyatakan bahwa ekonomi politik adalah: *“Mengacu pada masalah dasar sosial: hubungan antara ekonomi dan politik. Isu ini memiliki dua sisi baik eksplanatori maupun normatif. Isu ini memunculkan pernyataan mengenai bagaimana kedua proses tersebut saling terkait dan mengenai bagaimana seharusnya mereka terkait.”*³

Cakupan ekonomi politik kian kemari kian sulit, permasalahan ekonomi meliputi distribusi, alokasi, produksi dan konsumsi, nampaknya memaksa ekonomi untuk lembaga ekonomi dan sistem ekonomi politik bekerja menangani masalah tersebut. Disisi lain, seorang sarjana ilmu politik juga tidak bisa mengenyampingkan pembangunan dari segi ekonomi. Arah pergerakan

² James A. Caporaso dan David P. Levine, *Teori-Teori Ekonomi Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015).

³ Deliarnov, op.cit hal. 8.

ekonomi internasional menjadi salah satu yang tidak dapat terlepas dari kegiatan ekonomi politik saat ini, persoalan mengatasi eksternalitas dan penggandaan barang-barang publik menjadi salah satu tugas pemerintah. Seperti yang dikatakan Miriam Budiardjo bahwasannya: *“Seorang sarjana ilmu politik tidak lagi dapat mengabaikan pengaruh dan peran perdagangan luar negeri, bantuan luar negeri, serta hubungan ekonomi luar negeri pada umumnya terhadap usaha-usaha pembangunan dalam negeri.”*⁴

2. Strukturalisme dalam Perspektif Raul Prebich

Teori struktural muncul sebagai kritik terhadap ekonomi politik liberalisme yang membebaskan perdagangan tanpa ada campur tangan pemerintah dengan teori keuntungan komparatif. Teori ini termasuk salah satu teori ekonomi radikal, dengan berpendapat bahwa kemiskinan yang terjadi pada dunia ketiga adalah dari akibat eksploitasi negara maju terhadap negara dunia ketiga. Sehingga, surplus sering terjadi pada negara-negara maju.⁵

Strukturalisme sering dianggap berasal dari pemikiran Karl Marx, yang menganggap bahwa eksploitasi terhadap negara dunia ketiga adalah akibat semakin majunya teknologi yang dibuat oleh negara maju. Barang itu sendiri tidak mampu untuk diproduksi di negara dunia ketiga, sehingga mau tidak mau negara dunia ketiga harus membeli barang tersebut karena jika tidak akan semakin tertinggal. Dan hal ini berujung pada sistem kapitalisme yang menindas negara feodal, dengan penyelesaian kaum buruh harus bersatu untuk

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama) Hal. 32.

⁵ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995) hal 41.

menggulingkan kaum penindas. Namun tidak semua para pemikir strukturalis setuju sepenuhnya dengan argumen dan solusi yang dilontarkan Marx.

Selain dari pada itu, teori struktural ini melihat pada kondisi material manusia yang menjadi sumber kesedaran dan tingkah laku manusia. Kondisi material ini akan menentukan sistem sosial, politik dan budaya manusia. Menganalogikan dengan bangunan bawah sebagai aspek material manusia dan bangunan atas sebagai aspek non materialnya. Apabila bangunan bawahnya berubah, maka bangunan atas juga akan ikut berubah.⁶ Negara-negara pinggiran atau tidak maju, akan bangun dan berkembang mengikuti negara maju setelah tersentuh kapitalisme negara maju. Maka dari itu, kebijakan negara pinggiran akan terpengaruhi oleh kebijakan negara maju.

Raul Prebisch ahli ekonomi liberal asal Argentina, memiliki kepercayaan terhadap doktrin perdagangan bebas. Hal tersebut didorong karena pertumbuhan perekonomian di negaranya sejak 1860-an hingga 1920-an. Namun pada tahun 1930-an Argentina mengalami resesi besar, dan meambut Prebisch meninjau ulang teori keuntungan komparatif.⁷ Keuntungan komparatif ini adalah teori yang diyakini oleh para kaum liberal dapat membawa keuntungan kepada setiap pihak. Teori keuntungan komparatif adalah sebuah sistem yang memperhatikan faktor struktur produksi masing-masing negara. Setiap negara harus memproduksi barang yang mudah diproduksi dan murah dinegaranya

⁶ Ibid.

⁷ Oeka S. Abdoellah dan Dede Mulyanto, *Isu-Isu Pembangunan Pengantar Teoritis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2019) hal. 54.

(spesialisasi produksi barang). Spesialisasi ini akan membawa pada efisiensi karena hanya memproduksi barang ekonomis, dibandingkan harus memproduksi barang-barang yang dalam pengerjaannya sulit dan mahal. Hal inilah yang kemudian dianggap akan membawa perekonomian internasional lebih efisien.⁸

Tahun 1950 Prebisch diangkat sebagai direktur Direktorat Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin, dan menerbitkan hasil penelitiannya yang berjudul *Economic Development of Latin America and Its Principal Problems*. Isi dari penelitiannya adalah kritik terhadap teori keuntungan komparatif yang spesialisasi produksi membawa dunia menjadi dua kelompok, yakni negara-negara pusat yang memproduksi barang industri dan negara-negara pinggiran yang memproduksi hasil pertanian. Ketika kedua negara tersebut melakukan transaksi, yang terjadi adalah defisit yang dialami oleh negara pinggiran. Hal ini karena selalu ada penurunan nilai tukar komoditi pertanian terhadap komoditi industri, mengingat bahwa semakin mahalnya bahan untuk memproduksi komoditi industri. Negara maju sendiri masih melakukan proteksionisme terhadap komoditi primer yang diimpor mereka dan devisa mereka sendiri masih banyak. Jadilah ketimpangan yang semakin besar antara negara maju dengan negara pinggiran.⁹ Untuk itu, Prebisch menyebutkan bahwa ekonomi internasional (menggunakan teori keuntungan komparatif)

⁸ Mohtar Mas'ood, *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hal. 43.

⁹ Arief Budiman, op.cit hal. 46-47.

mengalami bias secara struktural yang lebih condong kepada negara-negara maju dan berlawanan dengan kepentingan negara pinggiran. Liberalisasi ekonomi ini kemudian dianggap sebagai sebuah hegemoni negara-negara maju terhadap negara-negara pinggiran, sebagai upaya mempertahankan dan memperkuat posisi mereka.¹⁰

Atas dasar hasil penelitian itulah Prebisch mengatakan bahwa negara-negara pinggiran harus mulai memproduksi barang-barang industri dan melakukan proteksionisme. Memang untuk mulai memproduksi barang industri tidaklah mudah dan memerlukan modal yang banyak, tapi begitulah fase awal negara pinggiran jika ingin menjadi negara maju.¹¹ Proteksionisme juga dilakukan untuk melindungi perusahaan industri yang masih kecil jika dibandingkan dengan negara maju. Ekspor komoditi primer tetap dilakukan untuk memenuhi cadangan devisa sebagai modal untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk memproduksi barang industri. Pemerintah memiliki peran penting untuk membebaskan negara dari keterbelakangan melalui kebijakan-kebijakannya.¹²

3. Dependensia dalam Perspektif Dos Santos

Teori dependensia atau ketergantungan percaya bahwa negara pinggiran atau negara satelit memiliki dinamikanya sendiri dalam berkembang menuju menjadi negara maju atau negara pusat. Theonio Dos Santos percaya

¹⁰ Lynn H. Miller, *Agenda Politik Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hal. 319-320.

¹¹ Robert Jackson dan Goerg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

¹² Arief Budiman, op.cit hal. 48.

bahwa baik itu negara pusat atau negara satelit saling ketergantungan satu sama lain, namun perlu diingat bahwa berat ketergantungan antara keduanya berbeda dan negara satelit memiliki tingkat ketergantungan terhadap negara pusat dibandingkan sebaliknya. Hal ini karena tingkat perekonomian negara pusat berada diatas negara satelit. Bahkan perkembangan negara satelit akan terpengaruh oleh perkembangan negara pusat. Negara pusat tidak akan mengalami kesulitan apabila terjadi suatu kekacauan politik atau ekonomi dari negara satelit. Namun sebaliknya, negara satelit akan terpengaruh oleh kondisi negara pusat. Meski begitu, Dos Santos percaya bahwa hubungan negara pusat tidak selalu membawa dampak negatif.¹³

Selanjutnya Dos Santos membagi beberapa jenis ketergantungan. Diantanya adalah:

- a) Ketergantungan kolonial. Dalam ketergantungan kolonial terjadi dominasi politik antara negara kolonial atau penjajah terhadap negara satelit. Kegiatan utama ekonomi yang dilakukan adalah ekspor yang mengeksploitasi sumber daya negara satelit. Monopoli terjadi sebagaimana jaman penjajahan.
- b) Ketergantungan finansial-industrial. Ketergantungan ini terjadi ketika fenomena negara satelit masih dikuasai oleh kekuatan-kekuatan finansial dan industrial dari negara pusat. Dominasi negara pusat terhadap negara satelit ini berupa modal investasi

¹³ Arief Budiman, op.cit. hal 69.

langsung maupun tidak langsung. Modal itu guna produksi untuk membuat bahan primer yang nantinya akan di ekspor pada negara pusat sebagai bahan utama industri.

- c) Ketergantungan teknologis-industrial. Bentuk ketergantungan ini tidak lagi berupa ekspor bahan mentah. Tetapi perusahaan multinasional mulai menanamkan modalnya dalam produksi yang ditunjukan untuk pasar domestik di negara satelit. Meskipun industri ini dilakukan di negara satelit dan tidak jarang dimiliki oleh pengusaha lokal, tetap saja teknologi berasal dari pengusaha multinasional tersebut. Tidak jarang modal berupa mesin industri yang disewakan oleh perjanjian paten.¹⁴

Dos Santos juga meyakini bahwa negara-negara pinggiran dalam mengatasi ketergantungannya adalah dengan melakukan industrialisasi di negerinya. Namun ada hambatan-hambatan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

- a) Dibutuhkan valuta asing yang besar. Valuta asing ini guna mengimpor teknologi, valuta asing dapat diperoleh melalui ekspor bahan mentah. Sayangnya, harga jual komoditi primer dipasar dunia cenderung turun.

¹⁴ Ibid.

- b) Neraca perdagangan internasional negara satelit terus mengalami defisit. Perdagangan yang defisit ini terjadi karena nilai tukar antara komoditi primer dengan industri yang jauh lebih murah, sektor ekonomi dinamis dinegara satelit dikuasai pemodal asing, dan pada akhirnya negara satelit perlu pinjaman luar negeri untuk menutupi defisit serta membiayai proses industrialisasi. Seringkali, pinjaman tersebut dijadikan alat untuk negara satelit ini menjalankan kebijakan ekonomi terbuka, sehingga surplus lagi-lagi disedot lebih banyak oleh negara pusat.
- c) Adanya monopoli teknologi membuat negara satelit harus membayar sewa apabila mau meminjam teknologi tersebut. Sistem paten teknologi yang diterapkan memiliki jangka waktu yang panjang sebagai tindakan pencegahan penyebaran teknologi tersebut.

Dos Santos juga mengatakan bagaimana proses industrialisasi tergantung. Industri ini mengalami kesulitan dalam menjual barang industrinya di pasar domestik. Hal ini dikarenakan buruh digaji dengan harga murah, sehingga daya beli menurun. Kemudian dengan semakin berkembangnya teknologi, maka sumber daya manusia yang diperlukan semakin sedikit. Penggunaan teknologi padat modal ini sering terjadi pada perusahaan industri.

Serta surplus yang lebih banyak mengalir keluar membuat modal untuk membangun industri nasional sendiri semakin kering.¹⁵

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan temuan penelitian-penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh orang lain yang memiliki kesamaan dalam permasalahannya. Hal ini penting untuk dijadikan sebagai data pendukung dalam mengkaji permasalahan ini. Berikut temuan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dan memiliki relevansi dengan penelitian ini:

¹⁵ Op.cit. hal 70.

Tabel 2.
Penelitian Terdahulu

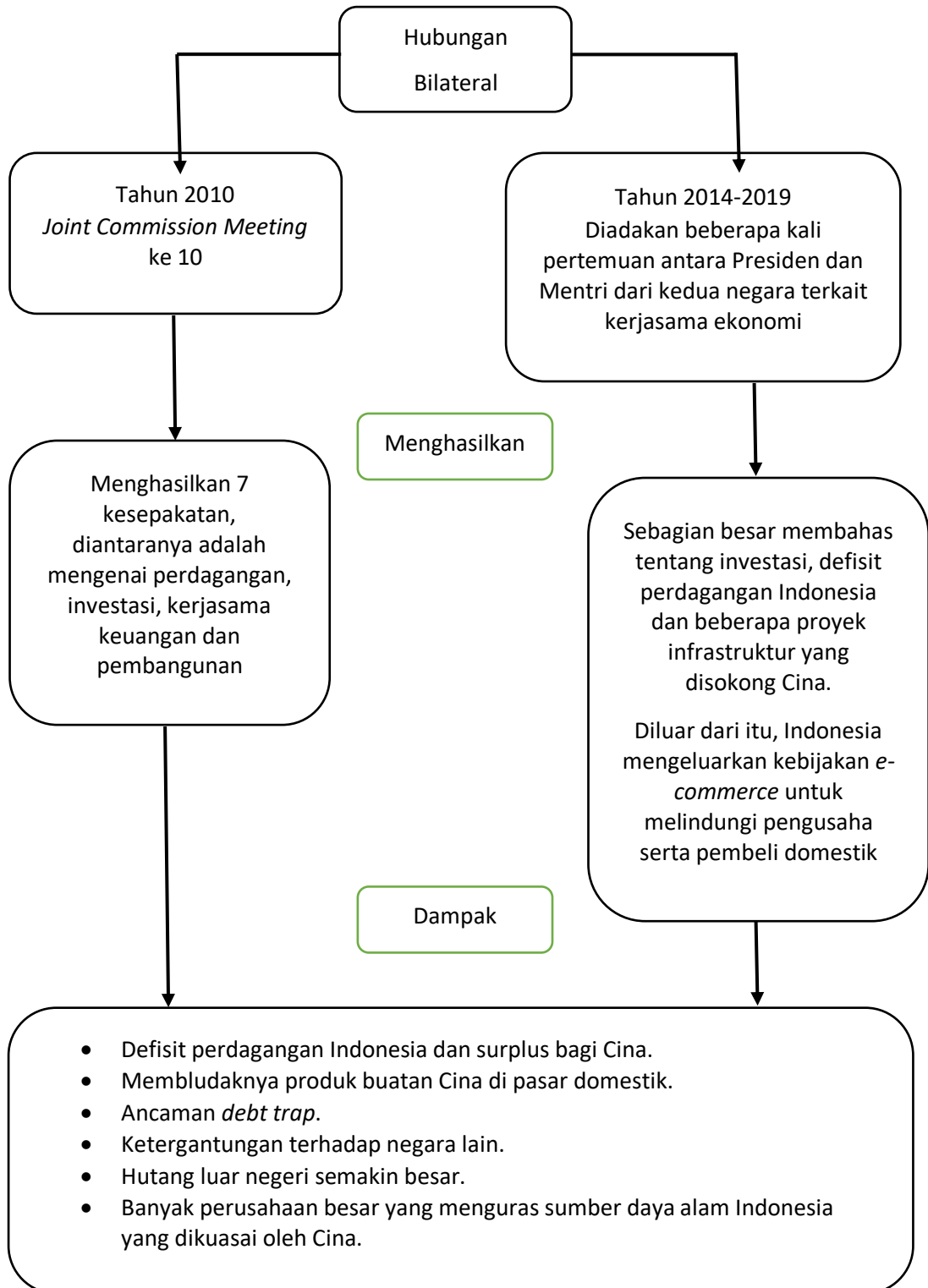
No	Judul penelitian	Pengarang	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Impor Indonesia Dari Cina Tahun 1985-2009.	Riris Septiana, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2011.	Penelitian ini terfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi impor total Indonesia dari Cina selama 1985-2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor total Indonesia yang berasal dari Cina selama 1985-2009.	Persamaan dari penelitian ini adalah memperhitungkan impor Indonesia dari Cina.	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan data yang digunakan adalah data runtut waktu. Dengan tolak ukur pada PDB, cadangan devisa, kurs, tingkat suku bunga dan investasi. Dan fokus hasil penelitian ini adalah pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan impor Indonesia dari Cina.
2	The Prospect of Indonesia China Economic Relation.	Suparman Zen Kemu, Jurnal, Kajian	Berfokus untuk mencari pengembangan	Fokusnya dengan melihat perkembangan trade dan iklim investasi di Indonesia.	Jurnal ini menggunakan analisis SWOT, dengan melihat fenomena hubungan ekonomi

		Ekonomi dan Keuangan, Volume 14 No. 3 Tahun 2010.	ekonomi antara Indonesia dengan Cina dimasa yang akan datang, keuntungan dan kerugian yang tersembunyi dari hubungan ekonomi tersebut, serta mencari dampak positif dan negatifnya. Cakupan dari jurnal ini adalah pada prospek pengembangan perdagangan dan investasi langsung dari Cina.		Indonesia dan Cina berasal dari kerjasama ASEAN+3, dan bukan pada ACFTA.
3	Indonesian Trade Under China Free Trade Area	Tavi Supriatna, Economic Journal of Emerging Markets,	Fokus penelitian ini adalah pada dampak dari perjanjian kerjasama ACFTA terhadap Indonesia	Dari perjanjian ACFTA ini, Indonesia lebih dirugikan karena menimbulkan efek kesenjangan dari adanya diversi dan kreasi dari Cina.	Metode peneitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan model analisis gravitasi.

		Universitas Sumatra Utara, 2011.			
4	ASEAN-China FTA: Dampaknya Terhadap Ekspor Indonesia Dan Cina	Sigit Setiawan, Jurnal, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, VOL.6 NO.2, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan-RI, 2012.	Fokus penelitian ini adalah mengukur dan menganalisis pengaruh atau dampak dari keikutsertaan Indonesia dan Cina dalam ACFTA dari sisi kontribusi ekspor dan peningkatan pertumbuhannya.	Dengan meneliti dampak keikutsertaan Indonesia dan Cina dalam ACFTA. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keduanya mendapatkan keuntungan dari skema ACFTA, meskipun disayangkan bahwa Indonesia belum mengoptimalkannya hingga lebih menguntungkan Cina dalam skema ini.	Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis ekonomikra.
5	Analisis Faktor- Faktor Makro Yang Berpegaruh	Dr. Sugartiningih, SE., MSi,	Jurnal ini berfokus pada keterkaitan suku bunga dalam negeri	Hasil dari penelitian ini sama dengan perkiraan peneliti bahwa Indonesia belum siap	Pendekatan deskriptif kausal (sebab akibat dari variabel bebas dengan variabel terikat), dengan

	Terhadap Perdagangan Indonesia Dengan Cina Dalam Usaha Merespon Pasar Bebas Tahun 2020	Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.	Indonesia dengan ekspor Indonesia ke Cina dan keterkaitan cadangan devisa periode sebelumnya dengan impor Indonesia dengan Cina.	dalam menghadapi perdagangan bebas internasional.	model analisis persamaan regresi. Jurnal penelitian ini hanya terfokus pada faktor-faktor makro yang berpegaruh terhadap perdagangan Indonesia dengan Cina dalam usaha merespon pasar bebas tahun 2020, tidak secara umum atau menyeluruh.
--	--	---	--	---	--

C. Kerangka Pemikiran



Hubungan antara Indonesia dengan Cina memanglah memiliki sejarah yang panjang, namun setelah *Joint Commission Meeting* ke 10 seperti menjadi babak baru kedekatan keduanya. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan seperti perihal perdagangan, investasi dan pembangunan. Produk yang paling utama dari pertemuan tersebut adalah tindak lanjut atau realisasi dari ACFTA, yakni undang-undang menurunkan bea cukai 0-5% pada tahun 2012. Awalnya kesepakatan ini diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih baik untuk Indonesia, tetapi pada kenyataannya membawa Indonesia pada defisit perdagangan berkepanjangan. Produk buatan Cina yang membludak menyulitkan pengusaha domestik, kemudian beberapa MoU tentang pembangunan infrastruktur menjadi ancaman *debt trap* bagi Indonesia. Era kepemimpinan Joko Widodo, permasalahan defisit perdagangan yang hingga kini menjadi isu yang diperbincangkan dalam pertemuan-pertemuan dengan Xi Jinping. Baru-baru ini dikeluarkan kebijakan *e-commerce* untuk melindungi konsumen dan sebagai tindakan memberikan peluang yang sama bagi penjual transaksi langsung khususnya penjual dalam negeri. Selain itu, banyak MoU perihal pembangunan infrastruktur yang ditandatangani Cina. Tahun 2015 saja ada 52 proyek yang di sokong oleh Cina, dan kekhawatiran bertambah dengan semakin banyaknya utang luar negeri Indonesia.

Untuk itu penulis berusaha mencari tahu bagaimana hubungan ekonomi politik Indonesia dengan Cina tahun 2014-2019. Beberapa pertanyaan seperti: siapa yang diuntungkan dari hubungan ini? Apakah Indonesia memiliki ketergantungan terhadap Cina? Apa ketergantungan

tersebut memberikan dampak yang baik bagi Indonesia? Dan pertanyaan lainnya yang diharapkan mampu menjadi penunjang untuk mengetahui bagaimana hubungan ekonomi politik Indonesia dengan Cina.